

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Dalam Upaya Menanggulangi Bencana Tanah Longsor Kota Balikpapan Tahun 2024

The Role of the Balikpapan City Regional Disaster Management Agency in Efforts to Mitigate the Balikpapan City Landslide Disaster in 2024

Fetty Septiana¹, Muhammad Hairul Saleh²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 14, No. 02
Page : 272-279
Published : 2026

KEYWORDS

BPBD, Upaya, Tanah Longsor, Bencana, Menanggulangi, Balikpapan

CORRESPONDENCE

Phone: +6283153545279
E-mail: septianafetty@gmail.com

A B S T R A C T

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan dalam mengatasi bencana tanah longsor di Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Balikpapan telah melakukan beberapa upaya penanggulangan bencana, termasuk mitigasi pra-bencana, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Pada tahap mitigasi, BPBD melakukan sosialisasi publik, pemetaan daerah rawan bencana, dan program kesiapsiagaan masyarakat. Selama tanggap darurat, BPBD mengkoordinasikan kegiatan evakuasi dan distribusi bantuan darurat. Namun, ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas, kendala anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana. Penelitian ini berkontribusi untuk memperkuat kebijakan penanggulangan bencana, khususnya di daerah perkotaan rawan tanah longsor.

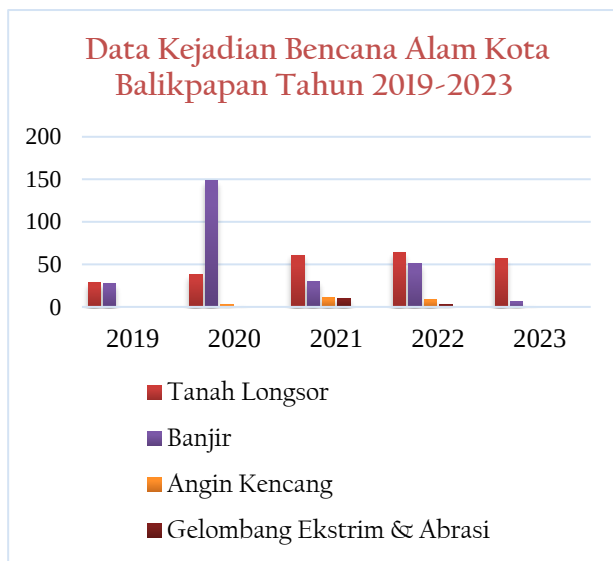
INTRODUCTION

Bencana alam merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia karena kondisi geografis, geologis, dan iklim yang mendukung terjadinya berbagai jenis bencana. Indonesia berada pada wilayah cincin api (ring of fire) dan memiliki curah hujan tinggi sehingga rentan terhadap bencana hidrometeorologi maupun geologi, salah satunya adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan pergerakan tanah atau batuan yang terjadi akibat terganggunya kestabilan lereng yang dipengaruhi oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Fenomena ini sering menimbulkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur, korban jiwa, gangguan aktivitas masyarakat, serta kerusakan lingkungan.

Kota Balikpapan merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki tingkat kerawanan tanah longsor cukup tinggi. Kondisi topografi yang berbukit, tingginya intensitas curah hujan, serta meningkatnya pembangunan kawasan permukiman pada daerah lereng menjadi faktor utama yang memicu terjadinya longsor. Beberapa wilayah di Kota Balikpapan diketahui sering mengalami bencana longsor terutama ketika musim hujan berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman longsor menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

Kejadian bencana tanah longsor merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Kota Balikpapan yang dapat dilihat pada grafik data kejadian bencana alam Kota Balikpapan tahun 2019-2023.

Dalam sistem penanggulangan bencana di daerah, pemerintah memiliki peran penting melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tugas tugas dari BPBD yaitu melakukan penanggulangan bencana



mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Peran BPBD tidak hanya sebatas penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pengurangan risiko bencana, edukasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman bencana.

BPBD Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana tanah longsor, seperti sosialisasi mitigasi bencana, pemetaan daerah rawan longsor, koordinasi evakuasi korban, hingga rehabilitasi pasca-bencana. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hal yang menghambat, mulai dari kurang

lengkapannya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kurangnya tingkat kepedulian masyarakat pada mitigasi bencana. Kondisi tersebut menyebabkan upaya penanggulangan bencana belum berjalan secara maksimal.

Penelitian ini membahas upaya BPBD Kota Balikpapan dalam menanggulangi bencana tanah longsor masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena fokus mengkaji upaya BPBD Kota Balikpapan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana tanah longsor, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan dalam Upaya menanggulangi bencana tanah longsor di Kota Balikpapan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan penanggulangan bencana daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah rawan longsor.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan dalam penanggulangan bencana tanah longsor ditinjau dari aspek kelembagaan pemerintahan. Fokus kajian mencakup pelaksanaan upaya pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, serta koordinasi BPBD dengan instansi terkait dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Balikpapan.

THEORETICAL FRAMEWORK

Peran

Menurut Rahayu (2019) mengatakan “Peran merupakan bentuk pelaksanaan kedudukan seseorang dalam struktur sosial yang diwujudkan melalui fungsi yang dijalankan di lingkungan masyarakat”.

Menurut Lepa dkk (2019) mengatakan “Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang dimilikinya sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat serta memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial.”.

Soerjono Soekanto (2002) mengatakan, “Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki.”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD Kota Balikpapan ialah sebuah lembaga pemerintah yang bukan bagian dari kementerian, bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana pada tingkat provinsi serta di Kabupaten ataupun Kota, sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tujuannya ialah untuk mengatasi permasalahan bencana dengan efektif serta mencapai tujuan yang diharapkan

BPBD didirikan khusus untuk mengatasi bencana dengan pendekatan komprehensif, mengubah cara tanggap darurat yang tradisional menjadi perspektif baru. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeluruh mempengaruhi seluruh aspek dalam penanggulangan bencana, dengan fokus dalam pengurangan risiko. Menurut UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 Pasal 20, BPBD bertanggung jawab untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta menangani pengungsi secara cepat, efektif, tepat, serta efisien. Mereka juga bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas penanggulangan bencana dengan cara terencana, terpadu serta menyeluruh.

Bencana

Rijanta dkk (2018) mengatakan, “Bencana merupakan peristiwa yang sulit diprediksi, menimbulkan kerusakan dan kerugian, serta membutuhkan penanganan secara khusus.”.

World Health Organization (2007) mengatakan, “Bencana sebagai kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau menurunnya derajat kesehatan masyarakat sehingga membutuhkan bantuan dari luar wilayah yang terdampak.”.

Menurut Tambunan (2016) mengatakan “Bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat akibat faktor alam, nonalam, maupun ulah manusia.”.

Upaya

Menurut (Heti 2023) mengatakan “Upaya merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan agar suatu kegiatan dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan, fungsi, dan manfaat yang telah ditetapkan.

Haryanto (2013) mengatakan, “Upaya merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan tanggung jawabnya.”.

Poerwadarminta (2006) mengatakan, “Upaya sebagai bentuk ikhtiar atau usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diharapkan.”.

Tanah Longsor

Supriyono (2014) mengatakan, “Tanah longsor merupakan pergerakan material berupa tanah atau batuan yang bergerak menuruni lereng mengikuti arah kemiringan permukaan”.

Nandi (2007) mengatakan, “Tanah longsor adalah perpindahan material penyusun lereng berupa tanah, batuan, maupun material rombakan yang bergerak ke bawah atau keluar dari lereng”.

Ilyas (2011) mengatakan, “Tanah longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan pada lereng alami maupun buatan akibat menurunnya kestabilan lereng”.

Dalam penelitian ini, konsep peran digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Balikpapan dalam penanggulangan bencana tanah longsor. Analisis dilakukan dengan melihat upaya yang dilaksanakan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk pelaksanaan peran BPBD, koordinasi dengan pihak terkait, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Dengan demikian, kerangka teori tidak hanya menjadi landasan konseptual, tetapi juga menjadi acuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan tugas tersebut. Sementara itu, penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan serta beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tanah longsor di Kota Balikpapan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya potensi terjadinya bencana tanah longsor di wilayah tersebut serta pentingnya peran BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tanah longsor, meliputi pegawai BPBD Kota Balikpapan, aparat pemerintah daerah, serta masyarakat yang terdampak bencana. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kebencanaan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi wilayah rawan longsor serta pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan upaya penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen pendukung, seperti arsip, laporan kegiatan, foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antarfenomena dapat dipahami secara sistematis. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil interpretasi terhadap seluruh data yang telah dianalisis sehingga diperoleh temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

RESULT AND DISCUSSION

Faktor Penyebab Tanah Longsor di Kota Balikpapan

Bencana tanah longsor di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh berbagai faktor alam maupun aktivitas manusia. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama penyebab longsor adalah tingginya curah hujan yang menyebabkan kondisi tanah menjadi labil dan mudah bergerak. Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu lama mengakibatkan meningkatnya kandungan air di dalam tanah sehingga daya ikat tanah berkurang dan memicu terjadinya longsor pada wilayah yang memiliki kemiringan lereng cukup curam.

Selain faktor curah hujan, kondisi geografis Kota Balikpapan yang didominasi wilayah berbukit juga menjadi faktor pendukung terjadinya longsor. Struktur tanah pada beberapa kawasan rawan longsor memiliki tingkat kestabilan rendah sehingga rentan mengalami pergerakan tanah ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh aktivitas pembangunan permukiman dan pembukaan lahan pada daerah lereng tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang wilayah.

Aktivitas manusia juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap meningkatnya bencana tanah longsor di Kota Balikpapan. Penggundulan lahan, minimnya sistem drainase, serta pembangunan rumah pada kawasan rawan longsor menyebabkan daya serap tanah menurun dan meningkatkan potensi terjadinya bencana. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya mitigasi bencana dan pembangunan berbasis lingkungan sehingga risiko longsor tetap tinggi pada beberapa wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana tanah longsor di Kota Balikpapan tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan kurang optimalnya pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan bencana yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi risiko longsor di wilayah tersebut.

Dalam Penelitian ini akan membahas upaya pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang dilakukan BPBD Kota Balikpapan dalam menanggulangi risiko bencana tanah longsor di Kota Balikpapan.

Upaya Pra Bencana oleh BPBD Kota Balikpapan

Dalam tahap pra-bencana, BPBD Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. Upaya pra bencana merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana tanah longsor. Upaya yang dilakukan pada tahap pra bencana (sebelum terjadi bencana) seperti berikut :

1. Penyusunan rencana darurat, mengembangkan rencana darurat yang mencakup prosedur evakuasi, tempat pengungsian, dan koordinasi dengan lembaga penyelamat dan relawan.
2. Membangun infrastruktur yang bisa bertahan dalam menghadapi bencana meliputi merancang serta membangun bangunan yang kokoh terhadap gempa, menyusun sistem drainase yang

efektif untuk mengurangi risiko banjir, serta menjalankan pemetaan wilayah yang rentan terkena bencana.

3. Memberi edukasi serta berbagai pelatihan kepada masyarakat mengenai berbagai langkah yang perlu diambil sebelum, saat, serta sesudah terjadinya bencana, serta memberikan informasi tentang tempat-tempat pengungsian dan rute evakuasi. Serta simulasi dan latihan, melakukan simulasi dan latihan evakuasi secara teratur untuk memastikan bahwa masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
4. Mengembangkan sistem peringatan dini guna memberitahukan masyarakat tentang ancaman bencana, seperti tsunami, gempa bumi, ataupun badai tropis.
5. Penelitian dan pemahaman risiko, melakukan penelitian untuk memahami risiko bencana di suatu wilayah dan mengidentifikasi prosedur konkret yang bisa dibuat agar meminimalisir risikonya.

Upaya Tanggap Darurat saat Bencana Longsor

Tahap tanggap darurat merupakan tahap yang dilakukan ketika bencana tanah longsor terjadi. Pada tahap ini BPBD Kota Balikpapan berfokus pada penyelamatan korban, evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. . Upaya yang diselenggarakan dari BPBD Kota Balikpapan untuk tahap tanggap darurat (ketika terjadi bencana) seperti berikut

1. Mobilisasi Tim Penanggulangan Bencana, mengaktifkan tim penanggulangan bencana, termasuk petugas pemadam kebakaran, petugas medis, dan relawan (swasta dan pemerintah), sesuai dengan rencana darurat yang telah ada.
2. Pertolongan Pertama dan Evakuasi, memberikan pertolongan medis darurat kepada korban bencana dan mengirimkan mereka ke fasilitas kesehatan yang aman. Serta mengarahkan penduduk yang berada di daerah rawan untuk dievakuasi ke tempat perlindungan yang aman.
3. Distribusi bantuan darurat, mengirimkan pertolongan darurat misalnya makanan, air bersih, obat-obatan, selimut, serta sarana lainnya kepada korban bencana.
4. Komunikasi dan Koordinasi, melakukan komunikasi darurat, memastikan sistem komunikasi darurat tetap berfungsi untuk berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana lainnya dan memberikan informasi kepada masyarakat. Serta berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga kemanusiaan lainnya untuk memastikan distribusi bantuan dan pertolongan yang efisien.

Upaya Pasca Bencana

Setelah bencana longsor terjadi, BPBD Kota Balikpapan melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Upaya yang diadakan BPBD Kota Balikpapan pada tahap pasca bencana dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut:

1. Evaluasi dampak penilaian kerusakan dan kebutuhan, melakukan survei untuk menilai kerusakan pada infrastruktur, rumah, dan komunitas. Serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak komunitas, termasuk pemulihan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan rumah.
2. Pemulihan infrastruktur, dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan kembali: memulihkan jaringan jalan, jembatan, sistem air bersih, sistem sanitasi, serta layanan listrik yang rusak atau hancur. Serta mendukung kesehatan dan pendidikan, memperbaiki atau membangun kembali pusat kesehatan dan rumah sakit yang rusak. Serta membangun sekolah baru atau memperbaiki sekolah yang rusak agar anak-anak dapat kembali ke pendidikan.
3. Pemulihan Ekonomi, memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro untuk membantu memulai kembali usaha mereka.

4. Rehabilitasi lingkungan, melakukan reboisasi dan restorasi lingkungan, melakukan penanaman kembali pohon dan restorasi lahan untuk mengurangi erosi dan memperbaiki lingkungan alam.
5. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana tanah longsor melalui tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Pada tahap pra-bencana, BPBD berupaya mengurangi risiko bencana melalui kegiatan mitigasi, seperti sosialisasi, edukasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan longsor, penyusunan rencana darurat, serta peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat. Pada tahap tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi koordinasi dalam proses evakuasi korban, pendistribusian bantuan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat penanganan bencana. Sementara itu, pada tahap pasca-bencana, BPBD melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan kondisi infrastruktur, lingkungan, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana tanah longsor oleh BPBD Kota Balikpapan telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Efektivitas pelaksanaan tugas tersebut dipengaruhi oleh kemampuan koordinasi antarinstansi, dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Meskipun demikian, pelaksanaan penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan jumlah personel, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya mitigasi bencana. Berbagai hambatan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program penanggulangan bencana sehingga diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pelaksanaan penanggulangan bencana tanah longsor oleh BPBD Kota Balikpapan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik bencana yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dengan cakupan wilayah yang lebih luas, menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam, serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah.

REFERENSI

- Aini, N., & Wahyuni, S. (2021). Mitigasi bencana tanah longsor berbasis masyarakat di daerah rawan bencana. *Jurnal Kebencanaan Indonesia*, 12(2), 45–55.
- Beong, S. (2018). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Mulawarman.
- Barus, L. P. (2013). *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.

- Karnawati. (2005). *Bencana alam gerak massa tanah di Indonesia dan upaya penanggulangannya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kusnanto. (2008). *Metode kualitatif: Ciri-ciri penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Lesmana, I. (2014). *Efektivitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya*. Skripsi. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Dokumen dan Peraturan

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2022). *Kajian risiko bencana Kota Balikpapan tahun 2022–2026*.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2021). *Rencana Strategis Kota Balikpapan Tahun 2021-2025*.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2018). *Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah*. Balikpapan: Pemerintah Kota Balikpapan.